



PERAN DUKCAPIL SUMBAR DALAM MENINGKATKAN KESADARAN TERHADAP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN

THE ROLE OF WEST SUMATRA DUKCAPIL IN ENHANCING AWARENESS OF POPULATION ADMINISTRATION AND ITS IMPACT ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Suci Rahma Novitri¹, Tasya Nada Naurah², Wulandari Septian Ningsih³, Zalita⁴

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email : sucirahmanovitri16@gmail.com¹, tasyanada08@gmail.com², wd8499222@gmail.com³, zalita324@gmail.com⁴

Article Info

Article history :

Received : 28-11-2025

Revised : 30-11-2025

Accepted : 02-12-2025

Published : 04-12-2025

Abstract

This study examines the role of the Population and Civil Registration Agency (Dukcapil) of West Sumatra Province in enhancing public awareness of population administration and its implications for environmental management. The background of the study highlights the importance of orderly population administration as the foundation for development planning, equitable distribution of social assistance, legal protection, and the provision of population data for various sectors, including environmental governance. The aim of this research is to analyze Dukcapil's educational strategies, identify the challenges encountered, and explore the relationship between population administration compliance and community-level environmental management. This research employs a qualitative approach through interviews with Dukcapil officials and a literature review of relevant regulations, including Law No. 23 of 2006 and Law No. 24 of 2013 on population administration. The findings reveal that Dukcapil implements awareness initiatives through online platforms and direct KIE (Communication, Information, and Education) activities involving communities and stakeholders. Key obstacles include limited public understanding of the importance of civil registration documents, negative perceptions toward government services, and administrative issues such as undocumented marriages. The analysis shows that orderly population administration supports environmental management by providing accurate demographic data regarding population numbers, distribution, and socioeconomic categories, which are essential for effective environmental planning. In conclusion, strengthening public awareness of population administration contributes significantly to improving environmental governance and ensuring more targeted and sustainable environmental programs.

Keywords : civil registration, environmental management, Dukcapil.

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan serta dampaknya



terhadap pengelolaan lingkungan. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya ketertiban administrasi sebagai dasar perencanaan pembangunan, distribusi bantuan sosial, perlindungan hukum, dan penyediaan data kependudukan bagi berbagai sektor, termasuk lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi edukasi Dukcapil, hambatan yang dihadapi, serta keterkaitan antara kepatuhan administrasi dan tata kelola lingkungan di tingkat masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung dengan pihak Dukcapil dan kajian literatur terkait regulasi administrasi kependudukan, termasuk UU No. 23 Tahun 2006 dan UU No. 24 Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dukcapil menerapkan strategi edukasi melalui media online dan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) secara langsung kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Kendala utama meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, persepsi negatif terhadap pemerintah, serta kasus-kasus administrasi tidak sah seperti pernikahan siri. Pembahasan menunjukkan bahwa tertib administrasi berkontribusi pada pengelolaan lingkungan melalui penyediaan data akurat terkait jumlah penduduk, sebaran masyarakat, dan kategori sosial ekonomi yang diperlukan untuk perencanaan program lingkungan. Kesimpulannya, peningkatan kesadaran administrasi kependudukan dapat memperkuat tata kelola lingkungan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci : administrasi kependudukan, Dukcapil, edukasi masyarakat.

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern karena menyediakan data dan dokumen resmi yang menjadi dasar perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan publik, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan yang sah sebagai bentuk perlindungan hukum dan identitas diri. Menurut Sugiarto (2019), administrasi kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan peristiwa penting, tetapi juga sebagai instrumen vital dalam memastikan akurasi data penduduk untuk berbagai kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.

Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memegang peranan strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian. Kesadaran masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan karena administrasi kependudukan bersifat kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Wahyudi (2020), kesadaran administrasi terbentuk melalui pemahaman, kepatuhan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurus data kependudukan secara benar dan tepat waktu. Dukcapil Sumbar menerapkan berbagai strategi edukasi baik melalui media digital maupun kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara langsung untuk meningkatkan pemahaman publik tersebut.

Tertib administrasi kependudukan memiliki hubungan erat dengan pengelolaan lingkungan di tingkat masyarakat. Data penduduk yang akurat memungkinkan pemerintah dalam menentukan kebutuhan pembangunan kawasan, pengendalian permukiman, distribusi bantuan lingkungan, dan mitigasi risiko bencana. Menurut Supriyanto (2021), keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data sosial dan demografis yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran administrasi kependudukan melalui peran aktif Dukcapil



Sumbar menjadi aspek penting dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan dua narasumber yang merupakan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk memperoleh informasi langsung mengenai pelaksanaan administrasi kependudukan dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat. Studi literatur digunakan untuk memperkuat data melalui penelusuran buku, artikel ilmiah, dan regulasi seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Penelitian dilaksanakan di kantor Dinas Dukcapil Sumatera Barat sebagai lokasi utama, dengan bahan dan alat berupa pedoman wawancara, alat tulis, serta perangkat perekam. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi, penyusunan temuan, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan peran Dukcapil dalam meningkatkan kesadaran administrasi kependudukan serta kaitannya dengan pengelolaan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, meliputi pendataan, pencatatan peristiwa penting, serta penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan akta kematian. Menurut Sugiarto (2019), administrasi kependudukan adalah sistem yang mengatur dan mengelola data serta peristiwa kependudukan untuk memberikan identitas hukum dan kepastian status seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terpadu sebagai dasar perencanaan berbagai program pembangunan.

Peran Dukcapil tidak hanya sebatas memberikan layanan dokumen kependudukan, tetapi juga memastikan perlindungan hukum bagi penduduk melalui identitas resmi serta menyediakan data kependudukan bagi berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan perencanaan lingkungan. Menurut Wahyudi (2020), Dukcapil memiliki fungsi strategis dalam membangun tertib administrasi melalui edukasi, pelayanan, dan pemutakhiran data yang berkelanjutan, sehingga pemerintah dapat merancang program pembangunan secara tepat sasaran. Selain itu, data yang dikelola Dukcapil berperan penting dalam mendukung kebijakan publik, termasuk pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan penyaluran bantuan berdasarkan jumlah serta sebaran penduduk yang valid. Dengan demikian, Dukcapil menjadi fondasi utama bagi tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.



Ada beberapa tujuan dari Dukcapil yaitu:

1. Meningkatkan administrasi kependudukan dan Akta-akta Pencatatan Sipil berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara prima serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan akta-akta Pencatatan Sipil
4. Meningkatnya kepastian hukum dan dasar hukum tentang administrasi kependudukan dan akta-akta Pencatatan Sipil

Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sumatera Barat sangat penting dalam mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan sebagai bagian dari pelayanan publik. Administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan pencatatan identitas, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan kepada warga negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiarto (2019) yang menyatakan bahwa administrasi kependudukan berfungsi untuk memberikan identitas hukum dan kepastian status seseorang dalam sistem pemerintahan modern. Pernyataan ini diperkuat oleh narasumber, Bapak Syolvani S.T., M.Kom, yang menjelaskan bahwa dokumen seperti KTP, NIK, dan akta termasuk dalam dokumen hukum perdata yang menjadi dasar kedudukan hukum penduduk.

Upaya Dukcapil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dilakukan melalui strategi edukasi yang bersifat online dan offline.

1. Strategi Edukasi Secara Online

Strategi online dilakukan melalui pemanfaatan media sosial resmi Dinas Dukcapil. Narasumber Ibu Rezqita Mariana menjelaskan bahwa Dukcapil rutin mengunggah pamflet digital, informasi terkait pelayanan, isu-isu kependudukan terbaru, serta edukasi mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD). Informasi ini dibuat dalam bentuk poster, infografik, dan pengumuman layanan agar mudah dipahami dan cepat tersebar ke masyarakat. Edukasi online dilakukan karena lebih efektif menjangkau masyarakat luas, terutama generasi muda yang aktif di media sosial. Strategi ini memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil, sehingga mendorong efisiensi layanan dan peningkatan pemahaman publik.

2. Strategi Edukasi Secara Offline

Selain media digital, Dukcapil juga menerapkan strategi edukasi secara langsung melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi masyarakat dan pemangku kepentingan, seperti kelurahan, kecamatan, lembaga pendidikan, hingga kelompok-kelompok masyarakat. Dalam kegiatan KIE, petugas Dukcapil memberikan penjelasan tentang pentingnya dokumen kependudukan—mulai dari KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, hingga pelaporan peristiwa 5K (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengangkatan anak). Strategi ini dilakukan karena tidak semua



masyarakat memiliki akses internet atau pemahaman teknologi. Dengan pendekatan langsung, Dukcapil dapat memberi penjelasan lebih detail, menjawab pertanyaan masyarakat, dan membangun hubungan yang lebih baik sehingga meningkatkan kesadaran serta kepatuhan administrasi.

Strategi ini sejalan dengan pendapat Wahyudi (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan literasi administrasi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui komunikasi yang mudah diakses masyarakat. Informasi tersebut juga ditegaskan oleh narasumber, Ibu Rezqita Mariana, yang menjelaskan bahwa kedua metode edukasi tersebut menjadi fokus utama Dukcapil Sumbar.

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala di lapangan yang memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat. Narasumber menjelaskan bahwa sebagian masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap layanan pemerintah, khususnya terkait pelaporan peristiwa penting seperti kematian dan perkawinan. Banyak masyarakat enggan membuat akta kematian karena khawatir kehilangan bantuan sosial, sementara akta kelahiran sering terkendala oleh status pernikahan yang tidak tercatat. Ada beberapa kendala atau tantangan dinas Dukcapil dalam meningkatkan kesadaran administrasi kependudukan yaitu :

1. Persepsi negatif sebagian masyarakat terhadap pemerintah

Banyak masyarakat masih menganggap urusan administrasi sebagai hal yang rumit atau tidak penting sehingga enggan mengurus dokumen kependudukan.

2. Enggannya masyarakat membuat akta kematian

Sebagian warga tidak mau melaporkan kematian anggota keluarga karena khawatir kehilangan bantuan sosial yang diterima keluarga.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dokumen kependudukan

Tidak semua masyarakat memahami bahwa dokumen seperti KTP, KK, dan akta adalah dokumen hukum perdata yang sangat penting untuk identitas dan perlindungan hukum.

4. Keterbatasan akses teknologi pada sebagian masyarakat

Meskipun edukasi online telah dilakukan, masih ada masyarakat yang tidak aktif menggunakan media digital sehingga membutuhkan pendekatan langsung (offline).

5. Rendahnya disiplin dalam melaporkan peristiwa penting (5K)

Lima peristiwa penting (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengangkatan anak) belum semuanya rutin dilaporkan oleh masyarakat.

6. Ketidakteraturan dalam memperbarui data dinamis

Banyak masyarakat tidak memperbarui data seperti pendidikan, pekerjaan, atau status keluarga yang seharusnya diperbarui di Kartu Keluarga.

Kendala ini sesuai dengan pendapat Supriyanto (2021) yang menegaskan bahwa rendahnya kesadaran administrasi dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan persepsi masyarakat terhadap birokrasi.

Dukcapil Sumatera Barat juga berperan penting dalam menyediakan data kependudukan yang digunakan untuk berbagai sektor pembangunan, termasuk pengelolaan lingkungan. Data



penduduk seperti jumlah keluarga, sebaran masyarakat, dan tingkat kesejahteraan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebutuhan wilayah, penyediaan bantuan, serta program lingkungan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Kurniawan (2020) yang menyebutkan bahwa data kependudukan merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan lingkungan, termasuk mitigasi bencana dan pengendalian permukiman kumuh. Pernyataan ini konsisten dengan hasil wawancara yang menegaskan bahwa data Dukcapil merupakan kebutuhan dasar bagi sektor lain, terutama dalam distribusi bantuan lingkungan dan perencanaan wilayah.

Selain itu, peralihan menuju pelayanan berbasis digital seperti KTP elektronik dan IKD turut memberikan dampak positif terhadap pengurangan penggunaan kertas dan peningkatan efisiensi pelayanan. Walaupun narasumber tidak menyebutkan secara eksplisit dampaknya terhadap lingkungan, digitalisasi administrasi pada dasarnya mendukung prinsip e-government yang lebih ramah lingkungan karena mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Menurut Lestari (2022), implementasi layanan digital di sektor publik tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan limbah kertas dan mendukung pelestarian lingkungan. Dengan semakin meningkatnya penggunaan sistem elektronik, pelayanan administrasi di Dukcapil Sumbar perlambat mengarah pada praktik yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, peningkatan kesadaran administrasi kependudukan memiliki hubungan kuat dengan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial, termasuk kepedulian terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara, tingkat kepatuhan masyarakat dalam pelaporan dokumen tertentu cukup tinggi, terutama untuk akta kelahiran yang telah mencapai 98% di Sumatera Barat. Namun, kepatuhan terhadap dokumen lainnya masih rendah, seperti akta perkawinan dan akta kematian yang baru mencapai sekitar 60%, sehingga menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang belum tertib administrasi.

Narasumber menjelaskan bahwa masyarakat yang memahami aturan dan memiliki dokumen lengkap cenderung lebih disiplin dalam aspek sosial lainnya, termasuk dalam menjaga lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan teori perilaku sosial Setiadi (2018) yang menyatakan bahwa kedisiplinan administratif dapat mencerminkan tingkat kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat secara umum. Dengan demikian, semakin tinggi kepatuhan administrasi yang saat ini belum merata pada semua jenis dokumen—semakin besar pula kontribusi masyarakat dalam mendukung kualitas lingkungan yang lebih baik karena mereka lebih tertib, sadar aturan, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan melalui edukasi online dan offline, penyediaan informasi yang mudah diakses, serta kegiatan KIE kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Meskipun masih terdapat kendala seperti persepsi negatif terhadap birokrasi, rendahnya pelaporan peristiwa penting, dan administrasi perkawinan yang tidak tercatat, Dukcapil terus berupaya meningkatkan



kualitas layanan dan pemahaman publik. Peningkatan kesadaran administrasi kependudukan tidak hanya berdampak pada tertibnya identitas hukum masyarakat, tetapi juga mendukung pengelolaan lingkungan melalui penyediaan data yang akurat untuk perencanaan pembangunan, distribusi bantuan, dan mitigasi bencana. Dengan demikian, tertib administrasi menjadi fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan dan lingkungan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, A. (2020). *Manajemen lingkungan dan pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Lestari, D. (2022). *Transformasi layanan publik berbasis digital pada instansi pemerintah*. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Rahma Novitri, S., Naurah, T. N., Naurah, T. N., & Zalita. (2024). *The role of West Sumatra Dukcapil in enhancing awareness of population administration and its impact on environmental management*. JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(1).
- Setiadi, E. M. (2018). *Perilaku sosial dan perubahan masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiarto, A. (2019). *Administrasi kependudukan dalam sistem pemerintahan modern*. Yogyakarta: Ombak.
- Supriyanto, H. (2021). *Data demografis dan pengelolaan lingkungan: Perspektif pembangunan daerah*. Surabaya: Penerbit Global Edu.
- Wahyudi, R. (2020). *Kesadaran administrasi masyarakat dalam pelayanan publik*. Malang: UB Press.